



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

PROFIL INDIKATOR KINERJA

2025-2029

(0295) 691331

dinlutkan@rembangkab.go.id

<https://:dinlutkan.rembangkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Profil Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profil Indikator Kinerja merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang juga menetapkan suatu Indikator Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Rembang yang telah dirumuskan.

Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Profil Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang ini. Semoga penetapan Indikator Kinerja ini turut berkontribusi besar mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 196607291993031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menjalankan urusan pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026-2029;
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode SMART, yaitu :

1. *Specific* artinya jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu
2. *Measurable* artinya dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. *Achievable*, artinya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas/sumber daya yang ada
4. *Relevant*, artinya selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
5. *Time-bound*, artinya dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. TUJUAN DAERAH

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Rembang maka telah disusun dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Rembang. Tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu.:

VISI II KABUPATEN REMBANG

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan

Dalam rangka mendukung misi kedua Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang juga perlu merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 maka telah ditetapkan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yaitu ***“Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”***.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan;
2. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinlutkan

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, susunan organisasi Dinlutkan terdiri atas:

1. Susunan Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kenelayanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Di dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 tahun 2021 tersebut di atas, setiap pejabat struktural dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tersebut di atas memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagaimana berikut :

2.1 Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sekretaris

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan

pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

2.2.1 Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan

Tugas Pokok :

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.2 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Kepala Bidang Kenelayanan

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kenelayanan yang terdiri dari produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

2.4 Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang produksi budidaya serta sarana dan prasarana budidaya.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

2.5 Kepala Bidang Bina Usaha Dan Peningkatan Daya Saing

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bina usaha dan peningkatan daya saing yang terdiri dari pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk

- perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

2.6 Kepala UPT TPI

Tugas Pokok :

Kepala UPT mempunyai tugas menyusun program kerja, kebijakan pembinaan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan tempat pelelangan ikan dan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- 2.6.1 penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT;
- 2.6.2 penyediaan sarana dan prasarana UPT;
- 2.6.3 pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- 2.6.4 penyelenggaraan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- 2.6.5 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.6.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha TPI

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT;
- b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
- c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPT;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPT

- e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPT;
- f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPT;
- h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
- i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPT;
- l. menyiapkan kegiatan memonitor dan evaluasi program dan kegiatan; dan menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021

BAB IV

PENETAPAN PROFIL INDIKATOR

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, maka telah dirumuskan Profil Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang tidak terlepas dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Profil Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel 4.1 PROFIL INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikator Tujuan						
	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	• PDRB Sub Sektor Perikanan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam lapangan usaha perikanan di suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu. • PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah gabungan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di suatu wilayah. • Hasil dalam Presentase adalah hasil perhitungan menunjukkan kontribusi sektor perikanan terhadap keseluruhan ekonomi wilayah tertentu	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\left(\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan}}{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}} \right) \times 100\%$	BPS	1 Tahun	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indikator Sasaran						

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	- Total Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dan biota air lainnya pada perairan laut dan perairan umum yang tidak dibudidayakan. - Total Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah seluruh hasil panen biota air (ikan, udang, kerang, rumput laut, dll.) yang berasal dari kegiatan pemeliharaan atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap +Total Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Dinlutkan	1 Tahun	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	• Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga adalah jumlah rata-rata ikan dan olahan ikan yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita/tahun. • Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga adalah jumlah rata-rata konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh individu secara non-rumah tangga, yaitu melalui pembelian atau konsumsi makanan jadi di luar rumah, seperti di restoran, warung makan, industri jasa boga, katering, serta pelayanan konsumsi lainnya dan dinyatakan dalam kilogram/kapita/tahun. • Angka Konsumsi Tidak Tercatat adalah perkiraan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat tetapi tidak tercatat dalam survei konsumsi rumah tangga maupun konsumsi makanan jadi, karena berasal dari sumber sumber konsumsi yang tidak melalui pembelian atau tidak tercatat secara formal contohnya yaitu hasil tangkapan sendiri, ikan pemberian/barter, konsumsi pada kegiatan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga + Konsumsi Luar Rumah Tangga + Konsumsi Tidak Tercatat	Susenas BPS DINLUTKAN		Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
--	--	---	---	--	----------------------------------	--	--

		sosial/tradisi, ikan yang dikonsumsi tetapi tidak tercatat dalam pengeluaran atau survey dalam kilogram/kapita/tahun.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nilai SAKIP OPD DINLUTKAN	- Perencanaan Kinerja adalah proses strategis untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu dan dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. • Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis untuk membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi (hasil aktual) yang dicapai di lapangan. • Pelaporan Kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah secara transparan kepada pihak yang berwenang (LAKIP). • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh instansi pemerintah (biasanya	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Pengukuran Sakip berdasarkan penjumlahan nilai: - Perencanaan Kinerja bobot 30 % - Pengukuran Kinerja bobot 25 % - Pelaporan Kinerja bobot 15 % - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 30%	LHE SAKIP Inspektorat Kabupaten Rembang	Tahunan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		oleh Inspektorat/APIP) untuk mengukur sejauh mana unit-unit kerja di bawahnya telah menerapkan manajemen kinerja secara konsisten dan akuntabel.					

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nilai IKM OPD DINLUTKAN	• Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur: angka rata-rata yang diperoleh dari akumulasi skor persepsi masyarakat terhadap satu indikator pelayanan tertentu. • NRR Tertimbang: nilai rata-rata unsur yang sudah dikalikan dengan bobot penimbangannya. • Nilai IKM Akhir ; Nilai akhir dari penjumlahan NRR Tertimbang biasanya berada pada skala 1–4. Untuk memudahkan pembacaan secara umum, nilai tersebut dikonversi ke skala 0–100	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Pengukuran IKM dihitung secara bertahap menggunakan nilai rata-rata tertimbang: 1. Mencari Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur : $\text{NRR} = \frac{\text{Total Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuisioner}}$ 2. Mencari NRR Tertimbang (Bobot): $\text{NRR Tertimbang} = \text{NRR} \times 0,11$ 3. Nilai IKM Akhir : $\text{Hasil penjumlahan seluruh NRR Tertimbang} \times 25$	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang	Tahunan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINLUTKAN	- Skor Kualitas Perencanaan : nilai yang mencerminkan sejauh mana sebuah instansi mampu memetakan potensi hambatan (risiko) sebelum sebuah program dijalankan. - Skor Implementasi : nilai yang mencerminkan sejauh mana rencana mitigasi yang telah disusun benar-benar dilaksanakan secara nyata di lapangan. - Skor Hasil : nilai yang mencerminkan efektivitas nyata dari seluruh proses manajemen risiko yang telah dilakukan. Setiap komponen tersebut dinilai berdasarkan parameter tingkat kematangan (maturity level) dengan skala 1 sampai 5	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Nilai IMR = (Skor Kualitas Perencanaan x 25%) + (Skor Implementasi x 50%) + (Skor Hasil x 25%)	PM	Tahunan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indikator Program						
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Total Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dan biota air lainnya pada perairan laut dan perairan umum	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Total Produksi Perikanan Tangkap tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang tidak dibudidayakan.					
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah seluruh hasil panen biota air (ikan, udang, kerang, rumput laut, dll.) yang berasal dari kegiatan pemeliharaan atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Angka Konsumsi Ikan (kg/Kap/Th)	- Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga adalah jumlah rata-rata ikan dan olahan ikan yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita/tahun. - Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga adalah jumlah rata-rata konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh individu secara non-rumah tangga, yaitu melalui pembelian atau konsumsi makanan jadi di luar rumah, seperti di restoran, warung makan, industri jasa boga, katering, serta pelayanan konsumsi lainnya dan dinyatakan dalam kilogram/kapita/tahun. - Angka Konsumsi Tidak Tercatat adalah perkiraan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat tetapi tidak tercatat dalam survei konsumsi rumah tangga maupun konsumsi makanan jadi, karena berasal dari sumber sumber konsumsi yang tidak melalui pembelian atau tidak tercatat secara formal contohnya yaitu hasil tangkapan sendiri, ikan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Total Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga + Konsumsi Luar Rumah Tangga + Konsumsi Tidak Tercatat	Susenans BPS DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemberian/barter, konsumsi pada kegiatan sosial/tradisi, ikan yang dikonsumsi tetapi tidak tercatat dalam pengeluaran atau survey dalam kilogram/kapita/tahun.					

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Skor SAKIP Hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Kabupaten Rembang	Laporan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Rembang	Tahunan	Sekretaris Dinas
	Indikator Kegiatan						
	Jumlah sarana dan prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	Total unit sarana dan prasarana yang telah dibangun, direhabilitasi, atau diserahkan kepada pelaku usaha (nelayan/kelompok nelayan)	Meningkatnya sarana dan prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia pada tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah Nelayan Kecil Yang diberdayakan	Total nelayan kecil atau kelompok nelayan kecil yang memperoleh intervensi penguatan kemampuan dan kapasitas	Meningkatnya Jumlah Nelayan Kecil Yang memperoleh akses pemberdayaan	jumlah nelayan yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana, pendampingan akses permodalan, asuransi nelayan, hingga pelatihan teknis atau manajerial pada tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan TPI	Perbandingan antara realisasi pelayanan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan target yang telah ditetapkan dalam periode tahun n	Tercapainya Persentase ketercapaian pelayanan TPI	Jumlah TPI yang aktif beroperasi dibanding dengan jumlah seluruh TPI	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubbag UPT TPI

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tahun n			
	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total surat izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pembudidaya ikan yang kegiatannya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	Total pembudidaya ikan atau kelompok pembudidaya yang memperoleh intervensi penguatan kemampuan dan kapasitas	Meningkatnya Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana, pendampingan akses permodalan, asuransi, hingga pelatihan teknis atau manajerial pada tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pembudidaya ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan	total pembudidaya ikan yang telah memperoleh dukungan atau akses terhadap sarana dan prasarana budiaya perikanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Meningkatnya jumlah Pembudidaya ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan	Jumlah Pembudidaya ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko	Jumlah Data statistik bidang pengolahan dan pemasaran yang tersusun	Tersusunya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS
	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit Pengolah dan Pemasar yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah pengolah dan pemasar yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Pengolah dan Pemasar yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tahun n	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Unit Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	unit usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang mendapat akses pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh instansi terkait	Meningkatnya jumlah Unit Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Total Unit Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah unit usaha atau pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang mendapatkan bantuan akses atau fasilitas dalam penyediaan bahan baku, permodalan dan sarpras	Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS
	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen laporan kinerja yang sesuai standar dan jadwal yang ditentukan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah indikator kinerja tercapai/ total indikator kinerja*100	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah dokumen kualitas baik dibagi total dokumen kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen penatausahaan BMD yang sesuai SOP dan tertib administrasi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah dokumen penatausahaan BMD sesuai SOP dibagi total penatausahaan BMD kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Persentase penyampaian laporan pendapatan perangkat daerah yang akuntabel	Persentase dokumen pendapatan yang dikelola secara akuntabel	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah dokumen pendapatan sesuai aturan dibagi total dokumen pendapatankali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola secara sistematis dan sesuai aturan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai aturan dibagi total dokumen kepegawaian kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Persentase pemenuhan pelayanan umum	Persentase kebutuhan pelayanan umum yang dipenuhi sesuai standar pelayanan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah layanan umum terprnuhi dibagi total kebutuhan layanan dikali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase fasilitas kerja pegawai yang tersedia dan sesuai kebutuhan minimal	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah sarpars tersedia dibagi total kebutuhan sarpras kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah layanan penunjang tersedia dibagi total kebutuhan layanan penunjang kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
0	Persentase BMD dengan kondisi Baik	Persentase aset tetap dalam kondisi baik dan dapat difungsikan optimal	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola internal DINLUTKAN	Jumlah BMD ddengan kondisi baik dibagi total BMD kali 100%	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Indikator Sub Kegiatan						
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen atau database mengenai potensi, jenis, dan sebaran sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Rembang	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun atau tersedia	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah fasilitas fisik yang dibangun atau di rehabilitasi untuk mendukung operasional nelayan	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit prasarana yang dibangun atau direhab	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah nelayan perorangan yang telah mengikuti pelatihan teknis atau bimbingan teknis peningkatan keterampilan	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mengikuti pelatihan atau Bimtek	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk secara resmi atau ditingkatkan kelas kelompoknya melalui pembinaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok (KUB) yang Difasilitasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit usaha atau KUB yang mendapatkan akses permodalan atau kerja sama mitra usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Mendapat Akses Modal/Mitra	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah bantuan alat tangkap, mesin kapal, atau sarana pendukung lainnya yang diberikan kepada nelayan kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Tangkap
	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen standar operasional Prosedur yang disusun dan ditetapkan untuk mengatu tata kelola perikanan	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen SOP yang ditetapkan	DINLUTKAN	Tahunan	kepala UPT TPI
	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Total aktivitas pelayanan yang diberikan kepada nelayan/pedagang di TPI, meliputi bongkar muat, penimbangan, dan	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Total layanan dalam 1 tahun	DINLUTKAN	Tahunan	kepala UPT TPI

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lelang.					
	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota yang diterbitkan	Dokumen saran teknis yang diterbitkan sebagai syarat verifikasi kelayakan bagi pelaku usaha budidaya ikan di wilayah Kabupaten/Kota.	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi yang diterbitkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
0	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) skala kecil yang telah mendapatkan pelatihan, penyuluhan, atau bantuan teknis peningkatan skill.	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Total kelompok yang mengikuti pengembangan kapasitas	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
1	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok pembudi daya ikan skala kecil yang telah dikukuhkan atau ditingkatkan kelas kelompoknya (dari pemula ke madya/utama) melalui pembinaan.	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang terbentuk dan telah memiliki dokumen pengukuhan resmi	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
2	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Kelompok usaha perikanan yang menerima akses modal, kredit, atau jalinan kemitraan dengan pihak ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Total kelompok usaha yang menerima fasilitasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Usahanya						
3	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok yang mendapatkan akses ke IPTEK, informasi pasar, serta pendidikan/pelatihan teknis budidaya atau pengolahan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mengikuti program pendampingan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
4	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan profil data lengkap mengenai jumlah pembudidaya, luas lahan, komoditas, dan produksi perikanan budidaya	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen atau database informasi terupdate	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
5	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total unit sarana dan prasarana yang dibangun atau direhabilitasi dalam kondisi berfungsi baik.	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total unit prasarana yang tersedia	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	umlah komoditas ikan dan sampel air/tanah di lokasi budidaya yang telah melalui pengujian laboratorium (klinis) untuk memastikan bebas penyakit dan residu	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah sampel yang lulus uji klinis	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
7	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan resmi yang mendokumentasikan proses pengawasan, diagnosa penyakit, dan rekomendasi tindakan terhadap kesehatan ikan dan kualitas lingkungan di wilayah kab/kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring yang diterbitkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
8	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total ketersediaan sarana pendukung (seperti benih, pakan, obat-obatan, atau alat mesin perikanan) yang didistribusikan atau tersedia di wilayah Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana yang tersedia	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
9	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan di darat (kolam, tambak, atau karamba) yang mendapatkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, atau pengawasan operasional	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang mengikuti pembinaan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Jumlah draf/rekomendasi dokumen teknis terkait penetapan kawasan peruntukan budidaya ikan atau perlindungan lahan perikanan agar tidak dialihfungsikan	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumlah dokumen usulan yang diterbitkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
1	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Total paket sarana produksi (seperti benih, pakan, atau alat perikanan) yang disediakan untuk mendukung operasional budidaya ikan di darat	Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah unit atau sarana prasarana yang tersedia	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Perikanan Budidaya
2	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Total pelaku usaha pengolahan/pemasaran yang telah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis terkait legalitas perizinan berusaha.	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha yang dibina	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS
3	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tambahan jumlah produksi/stok ikan yang tersedia untuk konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan di Wilayah Rembang	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Ikan Tahun n - Total ketersediaan Ikan n-1	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah individu atau kelompok usaha perikanan skala mikro/kecil yang menerima bantuan fasilitas (sarana/prasarana/perizinan)	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kabid Binus PDS
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja resmi yang disusun sesuai regulasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
6	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen anggaran dan laporan hasil rapat koordinasi penyusunan anggaran	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan koordinasi yang disusun	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
7	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah diverifikasi dan disahkan	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang diterbitkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen yang melaporkan pencapaian target fisik dan keuangan dalam periode tertentu	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
9	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan oleh dinas	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi internal	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
0	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data terverifikasi terkait sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dataset terverifikasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
1	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen resmi (berita acara) yang merangkum kesepakatan dan hasil perencanaan dalam forum pemangku kepentingan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah berita acara (BA) forum	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK yang menerima hak keuangan secara tepat waktu sesuai regulasi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen administrasi keuangan (SPP, SPM, SP2D) yang telah diverifikasi keabsahannya	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang valid	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan realisasi anggaran dan neraca tahunan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
5	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen resmi untuk menjawab temuan audit dan bukti pelaksanaan rekomendasi dari pemeriksa (Inspektorat/BPK)	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah dokumen tindak lanjut	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan periodik mengenai arus kas dan realisasi anggaran yang disusun secara rutin	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan periodik	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Program dan Keuangan
7	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset untuk mendukung operasional dinas	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan yang menyajikan nilai wajar aset daerah untuk keperluan akuntansi atau pemindahtanganan	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset (KIB/KIR) secara tertib	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen teknis mengenai target dan tata cara pemungutan retribusi sektor perikanan	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Basis data lengkap mengenai entitas yang wajib membayar retribusi	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dataset terverifikasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Fasilitas fisik yang disediakan untuk mendukung kedisiplinan	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit/fasilitas	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan seragam operasional untuk pegawai sesuai standar atribut kedinasan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket diterima	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Total dokumen fisik maupun digital hasil dari proses pendataan, pemutakhiran data, dan pengelolaan administrasi pegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Total PNS/Non PNS yang telah menyelesaikan pelatihan teknis atau fungsional sesuai tupoksi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai selesai mengikuti diklat	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Jumlah peserta yang hadir dan memahami sosialisasi terkait regulasi kelautan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	Jumlah peserta hadir mengikuti	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perundang-Undangan	/perikanan	PerundangUndangan	sosialisasi			Kepegawaian
7	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketersediaan material dan jasa pemeliharaan instalasi listrik untuk memastikan operasional kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen yang diterima/diadakan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Total paket sarana prasarana perkantoran yang berhasil diadakan untuk menunjang operasional kerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket sarana kantor yang diadakan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ketersediaan paket alat-alat penunjang kebersihan, pantry, atau perlengkapan umum lainnya yang diperlukan untuk operasional rumah tangga kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket alat rumah tangga yang diadakan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketersediaan bahan habis pakai secara periodik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah cetak dokumen, laporan, dan penggandaan materi administrasi kedinasan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket cetak	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah fisik atau digital dokumen referensi hukum/bacaan yang telah diproses untuk mendukung kerja	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah dokumen yang terealisasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah material operasional yang berhasil disediakan dalam satu periode.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket yang diadakan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dokumen tertulis yang mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penerimaan dan pelayanan tamu dinas	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan yang disahkan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Catatan/notulensi dan dokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakannya rapat koordinasi antar unit/lembaga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat/notulensi	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah berkas atau record yang telah dikelola, diklasifikasikan, dan disimpan sesuai prosedur kearsipan.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah berkas arsip yang terdata	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah kendaraan bermotor (roda 2/4) yang tersedia dan laik jalan untuk mendukung mobilitas dinas.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan siap pakai	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Paket Mebel	Total paket mebel/furnitur yang	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	yang Disediakan	diadakan untuk mendukung operasional kantor.					Umum dan Kepegawaian
9	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Total unit aset peralatan kantor dan mesin (selain mebel) yang berhasil diadakan.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
0	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Realisasi fisik penyediaan gedung atau bangunan pendukung yang layak fungsi.	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan distribusi dan administrasi persuratan.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen bukti pembayaran dan pengelolaan tagihan utilitas kantor (Listrik, Air, Internet)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen yang merangkum pelaksanaan berbagai jasa pelayanan umum untuk operasional harian kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Umum	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	RUMUS PENGUKURAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Total unit kendaraan operasional yang mendapatkan servis rutin serta pelunasan pajak STNK/perizinan tepat waktu.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Total aset mebel (meja, kursi, lemari, dll) yang menjalani perbaikan atau perawatan agar tetap layak pakai	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Total unit aset mesin atau alat kerja elektronik/mekanik yang dilakukan perawatan rutin atau perbaikan.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit alat/mesin	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah fisik bangunan atau ruangan yang mendapatkan perbaikan struktural maupun non-struktural (renovasi)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit yang dipelihara/direhabilitasi	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Total fasilitas pendukung gedung yang dipelihara atau diperbaiki fungsinya.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana yang dipelihara atau diperbaiki	DINLUTKAN	Tahunan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu unit kerja pemerintahan. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang disusun. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perencanaan kinerja berikutnya.

Rembang, Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 196607291993031004